

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) KABUPATEN PATI  
SALURKAN 1.395 PAKET SEMBAKO UNTUK JOMPO DAN JANDA  
NELAYAN**



**Sumber Gambar:**

<https://www.samin-news.com/2022/11/dkp-salurkan-3-991-paket-sembako-ke-jompo-dan-janda-nelayan.html>

**Isi Berita:**

Pati, Jateng (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mulai menyalurkan 1.395 paket sembako untuk jompo dan janda nelayan tradisional yang tersebar di Kabupaten Pati sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga nelayan saat musim paceklik.

"Janda nelayan karena sebelumnya suaminya juga nelayan. Sedangkan jompo nelayan merupakan nelayan yang usianya lebih dari 65 tahun," kata Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap DKP Pati Taryadi di Pati, Selasa.

Karena janda maupun jompo nelayan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan asuransi nelayan dan jaminan kesehatan nasional (JKN), kata dia, Pemkab Pati berinisiatif memberikan bantuan berupa paket sembako.

Sementara nelayan aktif, kata dia, sudah mendapatkan bantuan asuransi nelayan dan bantuan iuran untuk program JKN.

Bantuan paket sembako yang diberikan kepada janda dan jompo nelayan, terdiri dari beras 5 kilogram, 1 liter minyak goreng dan 1 kg gula pasir. Pendistribusian dimulai tanggal 18 September 2023 secara bertahap.

Untuk jumlah jompo 625 orang dan janda sebanyak 770 orang, sedangkan penyaluran bantuannya tersebar di 17 titik.

Pemkab Pati, kata dia, sebetulnya rutin memberikan bantuan paket sembako saat musim paceklik nelayan melalui APBD Pati, namun karena tahun ini tidak ada anggaran akhirnya dibantu oleh Baznas Pati.

"Hasil komunikasi dengan Penjabat Bupati Pati akhirnya DKP bekerja sama dengan Baznas Pati untuk menyalurkan program bantuan paket sembako untuk meringankan para janda dan jompo nelayan saat musim paceklik," ujarnya.

Diharapkan bantuan paket sembako tersebut bisa meringankan beban mereka, terlebih saat ini sedang memasuki musim paceklik, demikian Taryadi. (Akhmad Nazaruddin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/508167/dkp-pati-salurkan-1395-paket-sembako-untuk-jompo-dan-janda-nelayan>, “DKP Pati Salurkan 1.395 Paket Sembako Untuk Jompo dan Janda Nelayan”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://mitrapost.com/2023/09/19/seribuan-warga-jompo-dan-janda-nelayan-di-pati-peroleh-bantuan-sembako/>, “Seribuan Warga Jompo dan Janda Nelayan di Pati Peroleh bantuan Sembako”, tanggal 19 September 2023.

### **Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
    - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat

hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*